

**ANALISIS DANA DEKONSENTRASI DI SUMATERA SELATAN**



S.  
352.407  
Rya  
a  
2012

Skripsi Oleh:

**RYAN HARYOTOMO YUDHA**  
**NIM. 01061002062**  
**Jurusan Ekonomi Pembangunan**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih  
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**INDERALAYA**  
**2012**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA**

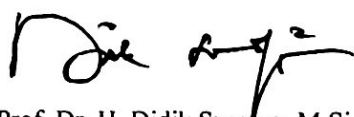
**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : RYAN HARYOTOMO YUDHA  
NIM : 01061002062  
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN  
MATA KULIAH : EKONOMI KEUANGAN DAERAH  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS DANA DEKONSENTRASI DI SUMATERA  
SELATAN

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 11 Mei 2012 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia ujian komprehensif  
Inderalaya, 11 Mei 2012

Ketua,



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si  
NIP.196007101987031003

Anggota,



Dr. Hj. Kosmiyati Chodijah Saleh, M.Si  
NIP. 195605171985032001

Anggota,




Drs. Harunnurasyid, M.Com  
NIP. 196009021989031001

Anggota,



Drs. Abbas Effendy, M.Si  
NIP. 195206101984031001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Azwardi, SE, M.Si  
NIP. 196805181993031003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ryan Haryotomo Yudha  
Nim : 01061002062  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul :

### **ANALISIS DANA DEKONSENTRASI DI SUMATERA SELATAN**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar keserjanaannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

o

Inderalaya, 7 Mei 2012  
Pembuat Pernyataan



Ryan Haryotomo Yudha  
Nim. 01061002062

## SURAT PERNYATAAN

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi dari mahasiswa,

Nama : Ryan Haryotomo Yudha

NIM : 01061002062

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

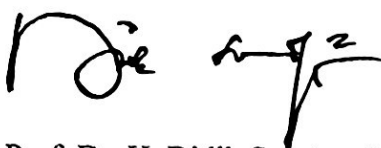
Judul : **Analisis Dana Dekonsentrasi di Sumatera Selatan**

Telah kami periksa cara penulisan, grammer, maupun susunan tensesnya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembaran abstrak.

Indralaya, 7 Mei 2012

PembimbingSkripsi

Ketua,



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si  
NIP. 196007101987031003

Anggota,



Dr. Hj. Rosmiyati Chodijah Saleh, M.Si  
NIP. 195605171985032001

**Motto:**

*‘Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik bagi hamba Nya, namun bukan berarti jalan hidupmu akan selalu mudah’*

*“Teruslah beradaptasi untuk tetap bertahan hidup, sebab itulah alasan utama masalah diciptakan”*

***Kupersembahkan karya tulis ini kepada :***

- 1. Almamaterku***
- 2. Kedua Orangtuaku***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Dana Dekonsentrasi di Sumatera Selatan" sebagai salah satu syarat untuk dapat meraih gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Banyak sekali hambatan yang dihadapi penulis dalam proses penulisan skripsi ini, tetapi berkat kuasa-Nya dan bantuan baik moral maupun materi dari pihak-pihak yang mendukung penulis sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktunya.

Masih banyak sekali kelemahan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan penulis, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca. Semoga nantinya skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Pada Kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan dukungan baik moral maupun material dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. **Dr. H. Syamsurijal, AK**, dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
2. **Dr. Azwardi, SE, M.Si**, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya
3. **Drs. Nazeli Adnan, M.Si**, Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan
4. **Drs. Nazeli Adnan, M.Si**, selaku Pembimbing Akademik yang baik dan sabar dalam membimbing dan memotivasi penulis selama 4 tahun ini.
5. **Prof. Dr.M. Didik Susetyo, M.Si**, Sebagai ketua dari anggota pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dan senantiasa memberikan dukungan, kritik, perhatian, dan motivasi selama membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. **Dr. Hj. Rosmiyati, M.Si**, Sebagai anggota pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dan senantiasa memberikan dukungan, kritik, perhatian, dan motivasi selama membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

7. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
8. Staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
9. Keluargaku tercinta, Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku terima kasih untuk Semoga Allah SWT membalas budi baiknya dan berkah kepada kita semua, Amin.

Inderalaya, 9 Mei 2012

**Penulis,**



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH .....	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
ABSTRAKSI .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Landasan Teori .....	8
2.1.1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara.....	8
2.1.2. Hubungan Keuangan Pusat -Daerah.....	11
2.1.3. Teori Pengeluaran Pemerintah (Transfer) .....	23
2.2. Penelitian Terdahulu .....	24
2.3. Kerangka Pemikiran .....	29
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Ruang Lingkup Penelitian .....	30
3.2. Metode Penumpukan Data .....	30
3.3. Teknik Analisis.....	30
3.3.1 Analisis Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Alokasi Dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat ke Provinsi Sumatera Selatan.....	31
3.3.1.1 Analisis Efektifitas .....	31
3.4. Batasan Variabel .....	32



## **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan.....	33
4.1.1 Keadaan Geografis Sumatera Selatan .....	33
4.1.2 Wilayah Administrasi .....	34
4.1.3 Kependudukan .....	35
4.1.4 Pertumbuhan Ekonomi .....	37
4.2. Hasil dan Pembahasan .....	39
4.2.1 Rasio Dana Dekonsentrasi di Provinsi Sumatera Selatan....	39
4.2.2 Perkembangan Dana Dekonsentrasi di Sumatera Selatan....	47
4.2.3 Efektivitas Alokasi Dana Dekonsentrasi Provinsi Sumatera Selatan .....	51
4.2.4 Elastisitas Dana Dekonsentrasi Terhadap PDRB .....	54
4.2.6 Dampak dari Pemanfaatan Dana Dekonsentrasi Terhadap Perkembangan Regional Provinsi Sumatera Selatan .....	56
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>59</b>
5.1. Kesimpulan .....	59
5.2. Saran .....	60

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **RIWAYAT HIDUP**

## **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan.....	33
4.1.1 Keadaan Geografis Sumatera Selatan .....	33
4.1.2 Wilayah Administrasi .....	34
4.1.3 Kependudukan .....	35
4.1.4 Pertumbuhan Ekonomi .....	37
4.2. Hasil dan Pembahasan .....	39
4.2.1 Rasio Dana Dekonsentrasi di Provinsi Sumatera Selatan....	39
4.2.2 Perkembangan Dana Dekonsentrasi di Sumatera Selatan.....	47
4.2.3 Efektivitas Alokasi Dana Dekonsentrasi Provinsi Sumatera Selatan .....	51
4.2.4 Elastisitas Dana Dekonsentrasi Terhadap PDRB .....	54
4.2.6 Dampak dari Pemanfaatan Dana Dekonsentrasi Terhadap Perkembangan Regional Provinsi Sumatera Selatan .....	56
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>59</b>
5.1. Kesimpulan .....	59
5.2. Saran .....	60

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Penyediaan Dana Dekonsentrasi di Provinsi Sumatera Selatan (2005-2010) .....	4
Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 .....	36
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2002-2010 .....	37
Tabel 4.3 PDRB Sumatera Selatan menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) Tahun 2005-2009 .....	39
Tabel 4.4 Rasio Dekonsentrasi Terhadap APBD.....	41
Tabel 4.5 Rasio Dekonsentrasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	42
Tabel 4.6 Rasio Dekonsentrasi Terhadap Dana Perimbangan .....	45
Tabel 4.7 Rasio Dekonsentrasi Terhadap PDRB .....	47
Tabel 4.8 Perkembangan Penyediaan Dana Dekonsentrasi di Provinsi Sumatera Selatan (2005-2010) .....	51
Tabel 4.9 Efektivitas Alokasi Dana Dekonsentrasi Provinsi Sumatera Selatan 2005-2010 .....	53
Tabel 4.11 Elastisitas Dana Dekonsentrasi Terhadap PDRB .....	56

## DAFTAR GAMBAR

Grafik 1.1 Perkembangan Penyediaan Dana Dekonsentrasi di Provinsi Sumatera Selatan (2005-2010) .....	4
Grafik 4.1 Rasio Dekonsentrasi Terhadap APBD.....	41
Grafik 4.2 Rasio Dekonsentrasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	42
Grafik 4.3 Rasio Dekonsentrasi Terhadap Dana Perimbangan .....	45
Grafik 4.4 Rasio Dekonsentrasi Terhadap PDRB .....	47
Grafik 4.5 Perkembangan Penyediaan Dana Dekonsentrasi di Provinsi Sumatera Selatan (2005-2010) .....	51
Grafik 4.6 Efektivitas Alokasi Dana Dekonsentrasi Provinsi Sumatera Selatan 2005-2010 .....	54
Grafik 4.7 Penyediaan Dana Dekonsentrasi dan Realisasi Dana Dekonsentrasi ..	54

## **ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dan efektifitas dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat ke provinsi sumatera selatan dan untuk mengetahui seberapa besar dampak dari dana dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat ke Provinsi Sumatera Selatan.

. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data tahun 2005 sampai tahun 2010 Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif, dimana menjelaskan data angka, baik yang diperoleh dari hasil perhitungan maupun dari Tabel-Tabel yang ada..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dana dekonsentrasi di Provinsi Sumatera Selatan tergolong efektif dengan rata-rata 86,06%. Selain itu pemanfaatan dana dekonsentrasi ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi regional, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci : Dana Dekonsentrasi, Efektivitas, dan Efisiensi**

## **An Analysis of the Deconcentration Fund in South Sumatera**

### **ABSTRACT**

This study was aimed at finding out to what extent the efficiency and effectiveness of the deconcentration fund given by the central government to South Sumatran province affected South Sumatran province

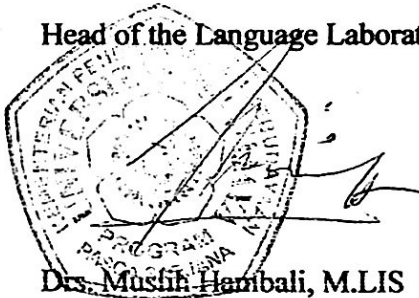
The data used in this study was secondary ones taken from the year 2005 to 2010. The qualitative method was used to describe numerical data taken both from the statistical findings and tables presented.

This study showed that the deconcentration fund was found effective with the percentage of 86,06 % on the average. Moreover, the utilization of this fund could provide a positive impact on regional economic development which in turn would improve the welfare of the local community.

**Keywords:** Deconcentration Fund, Effectiveness, and Efficiency.

Translated from the original copy

Head of the Language Laboratory, Graduate School of Sriwijaya University



**Drs. Mustih Hambali, M.LIS**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah dilaksanakan sejak tahun 2001 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Desentralisasi Fiskal adalah transfer kewenangan di area tanggung jawab finansial dan pembuatan keputusan termasuk memenuhi keuangan sendiri, ekspansi pendapatan lokal, transfer pendapatan pajak dan otorisasi untuk meminjam dan memobilisasi sumber-sumber pemerintah daerah melalui jaminan peminjaman (Litvac dan Seddon, 1998: 3) dalam (Abdullah 2005: 64).

Seiring dengan perubahan dinamika sosial politik, Pemerintah telah melakukan revisi beberapa materi dalam undang-undang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dengan ditetapkannya Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Alokasi Pelaksanaan Otonomi Daerah mengandung asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pengalokasian Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan didukung oleh peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Substansi perubahan kedua undang-undang tersebut adalah semakin besarnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan dan keuangan daerah. Dengan demikian diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan

prioritas daerah, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi regional, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dekonsentrasi sangat erat kaitannya mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena dekonsentrasi merupakan salah satu cara dari penyelenggaraan pemerintahan yang menghubungkan antara pemerintah pusat dan daerah tersebut ( Soeparman 1964: 10 )

Sentralisasi adalah pola hubungan pemerintah pusat dan daerah dimana segala urusan tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat dan pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Dan desentralisasi adakah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dimana semua urusan tugas dan wewenang diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah (Jhingan 2007: 70)

Instrumen utama kebijakan desentralisasi fiskal adalah melalui kebijakan Transfer ke Daerah, yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus. Adapun Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang merupakan komponen terbesar dari dana Transfer ke Daerah. Alokasi dana Transfer ke Daerah terus meningkat seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Hartanti, 2010: 59 ).

Pemberlakuan desentralisasi fiskal seiring dengan kebijakan otonomi daerah membawa dampak adanya transfer dari pusat kepada daerah dalam bentuk dana perimbangan yang melonjak drastis, baik secara proporsi maupun jumlah absolut. Dana perimbangan ini berkontribusi kepada lebih dari kabupaten/kota,



dan sekitar 70% rata-rata penerimaan daerah provinsi. Sebagai ilustrasi, ketika memasuki era desentralisasi, jumlah dana total APBD berbagai daerah melonjak menjadi 5 sampai 20 kali lipat. Penyebabnya adalah dana perimbangan yang sangat signifikan tersebut (Hirawan, 2007: 56).

Selain dana desentralisasi, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk membiayai program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah, yaitu dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dan dana untuk melaksanakan program dan kegiatan instansi vertikal di daerah. Walaupun dana-dana tersebut tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun secara nyata dana tersebut dibelanjakan di daerah, baik dalam bentuk belanja fisik maupun nonfisik. Jumlah dana tersebut cukup signifikan dan proporsinya terhadap belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup tinggi. Pada tahun 2008, total dana yang dibelanjakan di daerah telah mencapai 41,3 persen dari total belanja APBN (Nur, 2009: 37).

Penyelenggaraan tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah, Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Perbedaan dekonsentrasi dan desentralisasi terletak pada pelimpahan wewenangnya. Pada desentralisasi, penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus daerah dan pemerintahannya sendiri, sedangkan dekonsentrasi merupakan pelimpahan

wewenang pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat di wilayah tertentu.

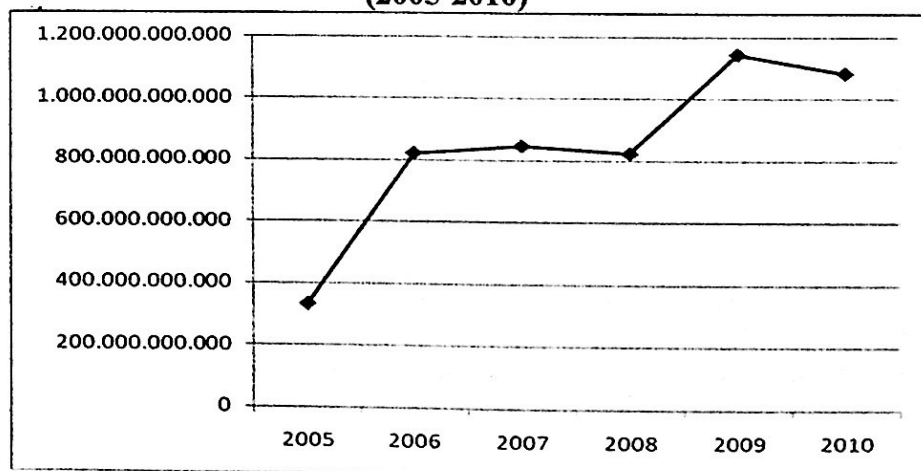
Pendanaan dekonsentrasi dialokasikan setelah adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah melalui kementerian kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah, dan pendanaannya dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat non-fisik seperti koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, pengawasan serta pengendalian.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Penyediaan Dana Dekonsentrasi di Sumatera Selatan 2005-2010 (Dalam Rupiah)**

No	Tahun	Dana Dekonsentrasi
1	2005	333.497.088.000,00
2	2006	820.594.117.000,00
3	2007	845.357.304.000,00
4	2008	821.939.789.000,00
5	2009	1.142.416.502.000,00
6	2010	1.081.335.525.000,00

*Sumber : BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan*

**Grafik 1.1**  
**Perkembangan Penyediaan Dana Dekonsentrasi di Sumatera Selatan (2005-2010)**



*Sumber : BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan*

Pada Tabel dan Grafik 1.1 Selama kurun waktu 6 tahun dari tahun 2005-2010 realisasi pelaksanaan kegiatan APBN dekonsentrasi di Provinsi Sumatera Selatan selalu mengalami Fluktuasi. Alokasi Dana Dekonsentrasi terbesar terjadi pada tahun 2009. Pada Tahun 2009 dana dekonsentrasi yang disalurkan sebesar Rp. Rp1.142.416.502.000,00. Untuk pengalokasian dana dekonsentrasi terkecil terjadi pada tahun 2005 sebesar Rp333.497.088.000,00

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008, dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah propinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan pelimpahan. Sementara dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota, dan/atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan. Pendanaan tugas pembantuan dari Pemerintah kepada pemerintah desa hanya dapat dilakukan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan tertentu setelah mendapat persetujuan dari Presiden.

Pengalokasian dana dekonsentrasi dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD. Selain itu, pengalokasian dana



dekonsentrasi juga dimaksudkan untuk lebih menjamin tersedianya sebagian anggaran kementerian/lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan.

Sifat kegiatan dari dekonsentrasi adalah berupa non-fisik yang berupa koordinasi, perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknik, pelatihan, penyuluhan, supervise, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Tetapi dana tersebut sebagian kecil dapat digunakan untuk kegiatan penunjang kegiatan non-fisik seperti pengadaan barang yang dapat menghasilkan aset tetap. Berbeda dengan sifat kegiatan dari tugas pembantuan yang berupa kegiatan fisik yaitu seperti kegiatan pengadaan barang seperti tanah/lahan, bangunan, pengadaan bibit, dan lainnya yang bersifat fisik.

Dana dekonsentrasi diberikan dan dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang pemerintah melalui Rencana Kerja Kementerian Lembaga (renja K/L) dengan memberikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada gubernur. Pendanaan melalui bagian K/L ini mengandung makna bahwa kegiatan dekonsentrasi sepenuhnya bersumber dari APBN sehingga tidak diperlukan lagi dana pendamping dari APBD.

Tujuan dari dekonsentrasi adalah untuk mengurangi kekuatan lokalisme dan memaksakan keseragaman dalam pembuatan keputusan yang berlaku secara nasional, juga merupakan metode bagi pemerintah pusat untuk meningkatkan kekuasaannya secara lebih efektif dengan mengekang kebebasan daerah. Tetapi apakah dekonsentrasi yang dilakukan tersebut sudah efektif dan terdapat efisiensi dalam menjalankan wewenang dari pemerintah pusat. Sedangkan di lain sisi,

daerah yang sudah menerapkan otonomi menginginkan kebebasan dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik mengkaji lebih jauh mengenai “Analisis Kebijakan Dana Dekonsentrasi Provinsi Sumatera Selatan”.

## **1.2 Permasalahan**

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektifitas alokasi dana Dekonsentrasi Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana dampak dari pemanfaatan dana Dekonsentrasi terhadap pembangunan Provinsi Sumatera Selatan?

## **1.3 Tujuan**

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar efektifitas dana dari pemerintah pusat ke provinsi sumatera selatan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar dampak dari dana dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat ke Provinsi Sumatera Selatan.

## **1.4 Manfaat**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan Ilmu Ekonomi Pembangunan Keuangan Daerah, khususnya yang terkait dengan dana dekonsentrasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah khususnya instansi yang terkait yang dapat berpengaruh terhadap keefektifan kebijakan mengenai dana dekonsentrasi yang akan diambil oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Dano, dkk. 2009. *Evaluasi Kebijakan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Di Dinas Kesehatan Propinsi Maluku Utara Tahun 2005 - 2007*. Working Paper Series No.1 Januari 2009
- Adi, Priyo, David Harianto.2007. "Hubungan Antara dana Alokasi Umum, belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita". *Jurnal akuntansi Simposium Nasional Akuntansi X 26-28 Juli 2007*. Universitas Hasanudin Makasar.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Diambil pada tanggal 25 November 2010  
<http://www.bpkp.go.id/viewberita.php?aksi=a&start=95&id=3568>
- Bizet, Bernard. 2002. "Deconcentration versus Decentralisation of Administration in France: A Centre-Periphery Dilemma". *Canadian Journal of Regional Science X XV : 3 (Autumn/automne 2002)*, 475-490.
- Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 2010. Dirjen Perimbangan Keuangan. Diambil pada 25 November 2010 dari  
<http://www.djpk.depkeu.go.id/datadjpk/33/>
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks
- Definisi efisiensi. Diambil pada 26 November 2010 dari  
<http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efisiensi/>
- Dirjen Perimbangan Keuangan, 2010. *Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah*. Jakarta
- Desentralisasi Kesehatan. Diambil pada tanggal 25 November 2010  
<http://www.desentralisasi-kesehatan.net/>
- Devas, Nick, dkk, 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI press.
- Jones, Rowan and Pendlebury, Maurice, 1996, *Public Sector Accounting*, London
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mangkoesoebroto, Guritno, 2001, *Kebijakan Publik Indonesia Substansi dan Urgensi*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang *Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan*

Susetyo, Didik, 2007, "*Upaya Fiskal dan Transfer Fiskal Dalam Otonomi Daerah (Studi Empirik Keuangan Kabupaten/Kota di Indonesia)*", Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis, Vol.9, No.2 Desember 2007.

Susiloadi, priyanto. 2007. "*Decentralization Concept and Issue in Government Management in Indonesia*". Jurnal Spirit Publik Vol 03 No. 2 hal 117-124 Oktober 2007

Tim PKP2A III LAN. 2008. "*Kewenangan Dekonsentrasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Permasalahan Penyelenggaraannya di Daerah*". Jurnal Borneo Admisistrator Vol. 04 No. 1 2008

Utomo, Tri Widodo. 2009. "*Balancing Decentralization and Deconcentration: Emerging Need fo/pr Asymmetric Decentralization in the Unitary States*". Discussion Paper No. 174